

“Kolonialisme penyatu” dan “kolonialisme pemecah” : perbandingan antara kolonialisme Belanda di Indonesia dan kolonialisme Inggris dan Perancis di Timur Tengah¹

Dr. Nikolaos van Dam

Seringnya melakukan perjalanan di Timur Tengah membuat saya tahu akan persamaan antara para penduduknya, tetapi sekaligus juga perbatasan yang memisahkan mereka. Perancis dan Inggris serta bekas penguasa kolonial lainnya umumnya dituding bersalah telah menyebabkan pemisahan di dunia Arab hingga terbentuk negara-negara yang terpisah. Namun tidak semua penguasa kolonial dituduh berniat untuk memisahkan dan menceraiberaikan daerah jajahan mereka. Dalam hal ini Belanda mungkin merupakan pengecualian.

Pada pertengahan 1990-an, saya berdiskusi terbuka dengan seorang politikus Syria yang mengemukakan bahwa kolonialisme Belanda di Indonesia, atau ‘Hindia-Belanda’ seperti yang disebut pada waktu itu, adalah sebuah contoh positif dari ‘*kolonialisme penyatu*’, yang berlainan dengan ‘*kolonialisme pemecah*’ yang rupanya telah dilakukan oleh para penguasa kolonial di dunia Arab.

Politikus Syria itu mengatakan bahwa Indonesia adalah sebuah kepulauan besar yang terdiri dari ribuan pulau, yang dihuni oleh beragam penduduk, berbicara beragam bahasa, mayoritas menganut agama Islam, tetapi banyak juga yang menganut agama lain. Ia berkesimpulan, ketika memperoleh kemerdekaannya, Indonesia tidak terpecah menjadi sejumlah negara seperti yang terjadi di dunia Arab, tetapi Indonesia justru menjadi suatu negara kesatuan yang penting. Secara retorik ia bertanya apakah itu disebabkan karena bangsa Indonesia memberontak melawan pemecahan? Atau karena bangsa Belanda mempunyai semacam kolonialisme penyatu, yang menurutnya bangsa Arab tidak ‘beruntung’ diperkenalkan dengan hal itu? Karena, menurutnya, para penguasa kolonial yang mendominasi dunia Arab justru seharusnya meninggalkan daerah jajahannya masing-masing sebagai satu kesatuan dan bukan membentuknya menjadi negara-negara yang terpisah satu sama lain.²

Kenyataannya, Belanda memang menerapkan suatu bentuk kolonialisme yang pada akhirnya menciptakan kesatuan wilayah luas yang kini disebut Republik Indonesia. Namun upaya mempertahankan wilayah kolonial yang luas itu oleh bangsa Belanda juga telah menyebabkan penumpasan terhadap gerakan separatis, yang seperti dalam kasus Aceh telah menyebabkan perang berdarah selama kurang lebih 30 tahun. Tanpa perang ini, Aceh saat ini mungkin tidak menjadi bagian dari Indonesia modern.

Namun di penghujung masa penjajahannya, Belanda mencoba untuk memperkenalkan sebuah sistem federal yang lebih longgar dalam upaya untuk mempertahankan pembagian kekuasaan di wilayah kepulauan besar ini. Tetapi kebijaksanaan ini gagal, karena gagasan tentang Republik Indonesia yang bebas dan bersatu mencakup seluruh kepulauan, sama sekali lepas dari Belanda, tampaknya didukung oleh sebagian besar masyarakat Indonesia

di seluruh negeri. Akibatnya, perbatasan-perbatasan bekas daerah jajahan menjadi perbatasan resmi Republik Indonesia. Tidak sejengkal lebih (sebagai akibatnya Timor Timur tidak termasuk di dalamnya, karena ia tidak dijajah oleh Belanda melainkan oleh Portugis) dan tidak sejengkal kurang (sebagai akibatnya Papua akhirnya bergabung pada tahun 1962).

Kita bisa menyimpulkan bahwa banyak negara umumnya bisa menerima perbatasan kolonial apabila sesuai dengan kepentingan mereka, tetapi cenderung menentangnya apabila ada kemungkinan untuk mengklaim wilayah yang lebih besar, terlepas apakah hal ini didasari oleh fakta sejarah atau tidak.

Dalam kaitan dengan perbatasan internasional, setiap jengkal wilayah memiliki nilai yang penting, karena menyangkut kedaulatan nasional. Dan kehilangan setiap jengkal wilayah dapat menimbulkan klaim-klaim lebih lanjut, ketidakstabilan politik, ketegang-ketegangan dalam hubungan internasional, dan terkadang juga peperangan. Karena hal inilah, perbatasan-perbatasan bekas daerah jajahan biasanya dihormati, betapapun kehadirannya mungkin saja tidak disukai.

¹ Bagian dari ceramah (dalam bahasa Arab) yang disampaikan oleh Dr. Nikolaos van Dam, Duta Besar Belanda, di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor pada 12 November 2007.

² ‘Abd Allah al-Ahmad, ‘Ila al-Safir Nikolaos van Dam’, *al-Safir*, 8 Juni 1995.